

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan adalah dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan serta penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun demikian tidak semua penduduk memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pembangunan, sehingga masih ada yang tertinggal dan tidak terangkat dari kemiskinan (Ferdinan, 2011).

Pembangunan nasional di Indonesia tidak lepas dari pembangunan daerah, karena Indonesia terdiri atas provinsi - provinsi, kabupaten / kota dan daerah - daerah yang lebih kecil lagi. Pembangunan memiliki definisi yaitu “suatu proses multidimensi yang mencakup adanya perubahan - perubahan yang penting didalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan. Tujuan inti dari proses pembangunan yaitu meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok dan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan pilihan

sosial seperti pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan dan perbaikan kualitas pendidikan (Todaro, 2003).

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu kegiatan dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Proses pembangunan daerah menuntut peran aktif masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan. Pemerintah berperan aktif dalam mendorong dan mengambil kebijakan terhadap jalannya pembangunan yang diwujudkan melalui perumusan, peraturan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mengarahkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan nasional Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata, material, dan spiritual (Pratomo, 2011).

Pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Pengaruh kualitas penduduk yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang berkualitas rendah akan menjadi beban dalam pembangunan. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara umum (Todaro, 2000).

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 19 Kabupaten / Kota di Sumatera Barat yang tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten / kota. Salah satu masalah yang perlu disikapi secara tegas dan bijak adalah masalah ketenagakerjaan. Adapun kondisi angkatan kerja yang bekerja di Sumatera Barat secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angkatan kerja mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan proses demografi. Dengan kata lain, jika jumlah penduduk terus bertambah maka jumlah angkatan kerja juga akan meningkat.

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah dari masa ke masa. Permasalahan ini menjadi penting mengingat berkaitan erat dengan pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah ketenagakerjaan menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena - fenomena sosial - ekonomi di masyarakat (Ferdinan, 2011).

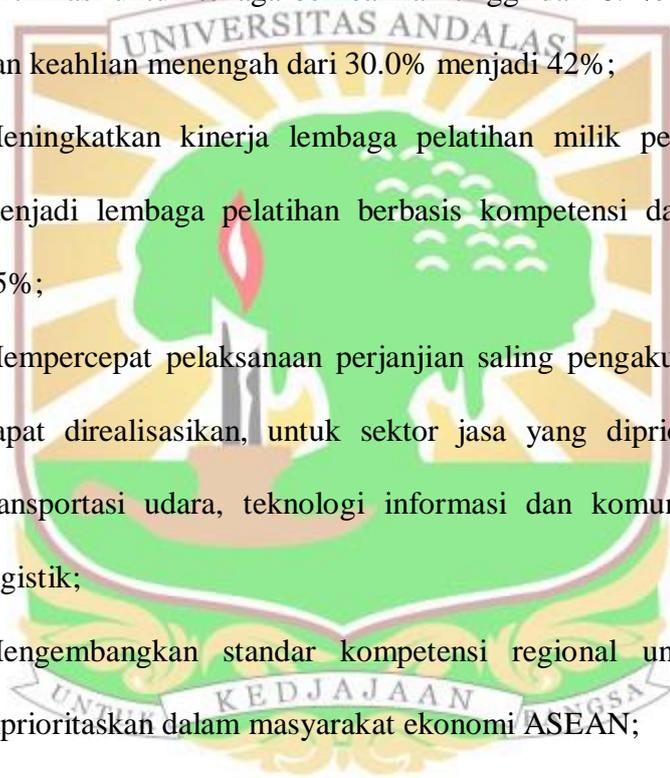
Ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas perhatian pemerintah, hal ini dapat tercermin pada :

1. Ketenagakerjaan selalu menjadi salah satu sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal

tersebut dapat dilihat pada RPJMN 1998-2004, RPJMN 2004-2009, RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019.

2. Sasaran pemerintah pada bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8.4% menjadi 14.0% dan keahlian menengah dari 30.0% menjadi 42%;
- b. Meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5% menjadi 25%;
- c. Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi dan jasa logistik;
- d. Mengembangkan standar kompetensi regional untuk jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;
- e. Penetapan KKNi (kerangka kualifikasi nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;
- f. Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional; dan
- g. Meningkatnya jumlah pekerja formal dari 40.5% tahun 2014 menjadi 51.0% tahun 2019.



Menurut Kuncoro (2003), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi oleh banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor perekonomian. Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran.

Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu (Purwanti, 2009).

Perkembangan angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Sumatera Barat, maka jumlah tenaga kerja yang diperlukan bertambah pula. Angkatan kerja di Sumatera Barat sebagian besar didominasi oleh golongan umur 25 - 34 tahun karena golongan umur ini telah menyelesaikan pendidikannya baik pada lama pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sehingga mendorong mreka memasuki pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan

cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan kedepan (Purnami, 2011).

Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, umumnya didasarkan pada kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari lama pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi produktivitas kerja, karena pendidikan merupakan modal untuk menciptakan produktivitas yang tinggi dalam suatu pekerjaan. Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Dengan pendidikan seseorang memiliki modal untuk melakukan produktivitas didalam suatu pekerjaan yang sesuai kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Dari segi pendidikan, maka sumber daya manusia yang belum bermutu tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan terutama pada bidang tertentu yang juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Mirisnya tenaga kerja pada tingkat tinggi pula yang seringkali terjerumus dalam lingkaran pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung. Hal ini disebabkan oleh penumpukan tenaga kerja terdidik di suatu tempat yang tidak bisa terkordinir oleh lapangan usaha yang tersedia. Akibatnya, banyak tenaga kerja bekerja di lapangan usaha yang tidak sesuai dengan standar pendidikannya (Ganie, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) perusahaan atau usaha industri adalah unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi atau struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Menurut Handayani (2010) pertumbuhan unit usaha dalam hal ini industri sedang dan besar pada suatu daerah akan menambah jumlah permintaan tenaga kerja. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja juga bertambah, artinya jika unit usaha atau industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan maka semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Menurut Undang-Undang No 3 tahun 1982 perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu : perusahaan perseorangan, firma dan perseorangan terbatas. Disamping itu ada pula perusahaan negara dan perusahaan yang dikendalikan secara koperasi. Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984 pembangunan industri bertujuan untuk memperluas dan meratakan kesempatan kerja dari kesempatan berusaha.

Dewasa ini banyak negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan selanjutnya peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan peningkatan devisa. Proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber - sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Manfaat ini dalam bentuk nilai uang, bisa saja berbentuk bukan uang (misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain - lain). Dilihat dari pengeluaran, investasi

ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama. Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode peninjauan dari suatu gagasan usaha / bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha / bisnis tersebut dilaksanakan (Pradana, 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pengaruh Lama Pendidikan, Jumlah Perusahaan dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998 - 2017”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh lama pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998 - 2017 ?
- 2) Bagaimana pengaruh jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998 - 2017 ?
- 3) Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998 - 2017 ?



1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lama pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998 - 2017.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998 - 2017.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998 - 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu pengaruh lama pendidikan, jumlah perusahaan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

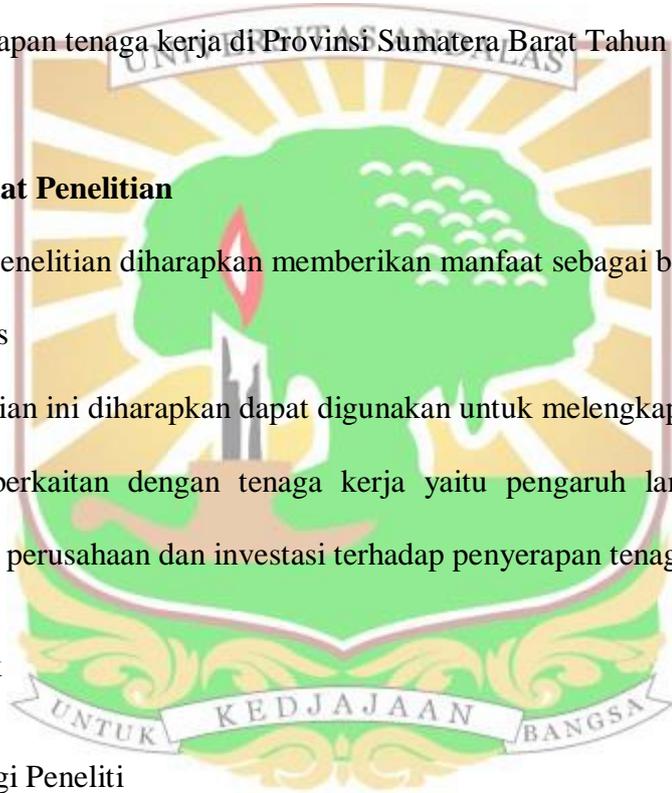
2. Praktik

a. Bagi Peneliti

- Peneliti memperoleh pengetahuan praktis terkait ilmu ekonomi.
- Dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memahami kondisi



ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Serta sebagai masukan bagi perencana pembangunan dalam merumuskan perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan terutama dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja.

c. Bagi Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembaca sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya akan membahas faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan berfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian di Provinsi Sumatera Barat dengan waktu penelitian (time series) yang digunakan dimulai dari tahun 1998 - 2017. Variabel dependen yang diteliti adalah Penyerapan tenaga kerja. Dan variabel independen yang diteliti adalah lama pendidikan, jumlah perusahaan dan investasi. Adapun data - data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi BPS Sumatera Barat dan Sumatera Barat dalam angka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh lama pendidikan, jumlah perusahaan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan dan Bab VI Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka akan diperoleh tujuan dari penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan dari masing - masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang mengemukakan berbagai teori, konsep dan penelitian terdahulu yang terkait yang kemudian dijadikan landasan dalam melakukan penelitian, yang kemudian dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel penelitian yang digunakan dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis

dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang kondisi geografis dan demografi Provinsi Sumatera Barat, serta perkembangan setiap variabel.

BAB V: TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan penjabaran dari analisis data, hasil pengolahan data kemudian interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari olah data yang dilakukan bab sebelumnya menyangkut pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi pemerintah provinsi. Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini serta memberikan lampiran.

